

**KONSTRUK PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM
BERWAWASAN MASA DEPAN**
(Refleksi Filsafat, Teori, dan Kurikulum)

Sutono¹

Abstrak

Kemanakah arah pendidikan Islam di masa depan harus dibawa? Sebuah pertanyaan klasik yang sering muncul tetapi sekaligus menantang bagi para civitas akademiknya untuk selalu memberikan jawabannya. Entah siapa yang salah, hingga saat ini, masyarakat umum masih mempunyai persepsi kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam. Faktanya, masih banyak pilihan orang tua memasukkan anaknya ke pendidikan Islam sebagai pilihan kedua setelah pilihan pertama ke lembaga pendidikan umum. Satu masalah bagi civitas akademika pendidikan islam untuk terus meneruskan jati dirinya agar lebih *acceptable* bagi masyarakat luas. Karena itu, pendidikan Islam harus selalu memperbarui sumber daya ke pendidikannya agar relevan dengan perkembangan masyarakat pengunanya. Agar arah pendidikan Islam dimasa depan tidak sekedar mengikuti arus perubahan yang telah terjadi, maka pendidikan Islam perlu untuk memikirkan kembali filsafat, teori, dan kurikulum pendidikannya. Dengan demikian pendidikan islam tidak akan kehilangan jati dirinya sendiri, tetapi justru yang terjadi adalah pendidikan islam tidak akan memainkan peranan aktif dalam arus pergaulan global yang sedang berjalan ini.

Kata kunci : Pendidikan Islam, Globalisasi, Filsafat, Teori, dan Kurikulum

¹ Dosen STAI AL AZHAR Menganti Gresik

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia secara umum, sering kali diklaim kurang mampu dalam menjawab tantangan, perubahan dan tuntunan masyarakat. Pendidikan yang diyakini oleh kalangan ahlinya menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan visi kehidupan dan dapat memberikan informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup di masa depan serta membantu peserta didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghadapi perubahan. Sehingga out putnya kurang memiliki kesiapan riil bagi kepentingan profesi dan juga pengembangan bagi kedisiplinannya.

Pendidikan yang seharusnya berwatak dinamis kreatif telah dijerat oleh kepentingan-kepentingan emosional yang sifatnya semu. Banyak muatan-muatan yang sifatnya “sesaat” telah dirakit sedemikian rupa seolah menjadi inti yang harus digeluti sehingga kritik tajam yang melanda dunia pendidikan selalu disibukkan pada masalah-masalah yang sangat dangkal seperti praktik-praktik pendidikan agar lulusannya mampu memproduksi secara nyata siap pakai, sesuai dengan industri, dan semacamnya tanpa mempertimbangkan lagi aktifitas pendidikan yang lebih esensial.

Sampai kapanpun sulit bagi dunia pendidikan untuk memproduksi lulusannya agar siap pakai. Orang sekolah bukan untuk menjadi tukang tetapi mendidik orang untuk “menjadi” dirinya. Karena bagaimanapun teknologi terus berkembang, oleh karena itu pendidikan untuk siap berkembang (*ready for develop*), siap didik (*ready for learning*), dan siap latih (*ready for train*).

Oleh karena itu, kebijakan baru dalam dunia pendidikan hendaknya tidak ekstrim, seperti menitikberatkan ke teknologi secara berlebihan. karena pendidikan tidak hanya mengasah otak dan tangan tetapi juga mengasah hati. Dalam konteks menyeimbangkan antara pendidikan otak, tangan, dan hati ini, pendidikan Islam memegang peranan penting pada masa mendatang yang tampaknya masih akan didominasi oleh arus globalisasi. Untuk melihat peluang pendidikan islam dikancah globalisasi tampaknya sangat bermakna kalau kita lihat lebih dahulu bagaimana pergaulan global itu dijalankan.

HAKIKAT DUNIA GLOBAL

Dewasa ini, peradaban dunia secara keseluruhan berada dalam tatanan global yang secara mendasar ditopang oleh perkembangan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi. Semuanya ini membuat dunia semakin global dan sempit karena mudahnya dijangkau (Akbar, 1994 : 1-2). Di sisi lain abad ini disebut sebagai pasca modern, suatu keadaan yang dapat dipandang sangat demokratis (Budiman, 1994 :16). Disebut sangat demokratis karena abad ini memberikan kesempatan terhadap semua “peradaban semesta” (Harapan, 1997 : 133) inilah fenomena “globalisasi” yang secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian budaya, politik, ekonomi, dan informasi nasional bangsa-bangsa ke ruang lingkup dan tatanan baru sistem jaringan dunia global.

Pada tahun 1990, John Naisabitt dan Patricia Aburdene dalam *Megatrends 2000*, merumuskan sepuluh kecenderungan peralihan yang secara mendasar mengubah wajah kehidupan dunia global. Kesepuluh *trend* tersebut adalah : *Pertama*, ledakan ekonomi global dan globalisasi ekonomi. *Kedua*, kebangkitan kembali seni budaya. *Ketiga*, munculnya ekonomi global sosialis. *ke empat*, berkembangnya gaya hidup global dan nasionalisme kultural. *Kelima*, swastanisasi negara-negara sejahtera. *Keenam*, bangkitnya kepemimpinan wanita. *Ketujuh*, kejayaan era biologi. *Kedelapan*, kebangkitan kembali era agama. *Kesembilan*, berjayaanya individual.

Kemudian pada tahun 1996, Naisabiit kembali mengejutkan dengan ramalannya tentang fenomena yang akan terjadi di kawasan Asia era global. Dalam buku *Megatrends Asia*, ia mengidentifikasi delapan kecenderungan utama yang sedang dan akan berlangsung di asia dan berpengaruh besar pada perkembangan dunia kini dan masa depan. Kedelapan kecenderungan itu adalah : *pertama*, peralihan dari negara bangsa (*Nation – State*) menuju sistem jaringan. *Kedua*, peralihan dari tradisi-tradisi pilihan. *Ketiga*, peralihan dari orientasi ekspor menuju orientasi konsumen. *Keempat*, peralihan dari kontrol pemerintah menuju orientasi pasar. *Kelima*, peralihan dari pertanian menuju kota super. *Keenam*, peralihan dari padat karya menuju teknologi tinggi. *Ketujuh*, peralihan dari dominasi laki-laki menuju kebangkitan perempuan. *Kedelapan*, peralihan dari Barat ke Timur.

Setelah beberapa tahun berlalu dari terbitnya kedua buku Naisabitt diatas, kini kita bisa menyaksikan bahwa sampai pada tingkat tertentu prediksi tersebut telah banyak yang menjadi kenyataan. Sebagian

mungkin belum, tapi indikasi dan kecenderungan kearah itu sudah mulai terlihat atau semakin jelas penampakkannya.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa secara umum pergaulan global yang terjadi saat ini dan yang akan datang dirumuskan ciri-cirinya (haharap, 1998 : 1995) sebagai berikut :

1. Terjadinya pergeseran dari konflik ideologi dan politik kearah persaingan perdagangan, investasi, dan informasi, dari keseimbangan kekuatan (*Balance of power*) kearah keseimbangan kepentingan (*Balance of interest*).
2. Hubungan antara negara atau bangsa secara struktural berubah dari sifat ketergantungan (*Interdependency*), hubungan yang bersifat primordial berubah menjadi sifat tergantung kepada posisi tawar menawar (*bargaining position*),
3. Batas-batas geografis hampir kehilangan arti operasionalnya. Kekuatan suatu Negara ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan keunggulan komparatif (*Comparative Advantage*) dan keunggulan kompetitif (*Kompotitive Advantage*).
4. Persaingan antar Negara sangat diwarnai oleh peran penguasaan teknologi tinggi. Setiap Negara terpaksa menyediakan dana yang besar bagi penelitian dan pengembangan.
5. Terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien, tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomi tidak efisien
Kehidupan global akan melahirkan kebudayaan global dewasa ini kita lihat betapa kebudayaan global telah melanda kehidupan global yang tanpa batas ini. Lihat saja kepada berbagai bentuk *live style* yang mulai melanda anak-anak generasi muda, orang dewasa, orang tua, baik yang berprofesi sebagai pelajar, pegawai negeri, karyawan, ekonomi, politisi, dan bahkan golongan agamawan. Cara hidup global, tontonan global, makanan global, cita rasa global, telah memasuki kehidupan masyarakat kita.

Pergaulan global dengan cirinya seperti diuraikan di atas di samping mendatangkan sejumlah kemudahan bagi manusia juga mendatangkan sejumlah efek negative yang sangat merepotkan disana sini. Dampak negative tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (harahap, 1998 : 11-12) :

1. Pemiskinan nilai spiritual, tindakan sosial yang tidak mempunyai implikasi materi (tidak Produktif) dianggap sebagai tindakan tidak rasional.

2. Kejatuhan manusia dari makhluk spiritual menjadi makhluk material yang menyebabkan nafsu *hayawiah* menjadi pemandu kehidupan manusia.
3. Peran agama digeser menjadi urusan akhirat sedang urusan dunia menjadi urusan sains (sekularistik).
4. Tuhan hanya hadir dalam pemikiran, lisan, dan tulisan, tetapi tidak hadir dalam perilaku dan tindakan.
5. Gabungan ikatan primordial dengan sistem politik modern melahirkan nepotisme, birokratisme, dan otoriterisme.
6. Individualistik. Keluarga pada umumnya kehilangan fungsinya sebagai unit terkecil pengambil keputusan seseorang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri tidak lagi bertanggung jawab pada keluarga. Ikatan moral pada keluarga semakin lemah dan keluarga dianggap lembaga teramat tradisional.
7. Terjadinya frustrasi eksistensial, dengan ciri-cirinya : *Pertama*, hasrat berlebihan untuk berkuasa (*the will of power*), bersenang-senang untuk berkuasa, bersenang-senang untuk mencari kenikmatan (*The will to pleasure*), yang biasanya tercermin dalam perilaku yang berlebihan untuk mengumpulkan uang (*The will to money*), untuk bekerja (*The will to work*), dan mengejar kenikmatan seksual (*The will to sex*). *Kedua*, kehampaan eksistensial berupa perasaan serba hampa, hidupnya tidak bermakna, dan lain-lain. *Ketiga*, neuroses nogenik, perasaan hidup tanpa arti, bosan, apatis, tak mempunyai tujuan, dan sebagainya. Keadaan semacam ini semakin banyak melanda manusia, hari demi hari.
8. Terjadinya ketegangan-ketegangan informasi di kota dan di desa, kaya dan miskin konsumeris, kekurangan dan sebagainya.

Globalisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari dan memang tidak perlu untuk dihindari. Persoalannya adalah bagaimana menampilkan visi pendidikan Islam di kancah global tersebut. Agar pendidikan Islam berperan dalam masyarakat global tersebut, marilah kita coba untuk mencermati dan merenungkan kembali bagaimana filsafat, teori, dan kurikulum pendidikan Islam sekarang. Karena variabel tersebut merupakan substansi yang harus ada dalam kegiatan pendidikan yang akan memberikan arah dan modal semacam apa yang diinginkan oleh pendidikan itu sendiri.

KEGUNAAN FILSAFAT DAN TEORI PENDIDIKAN

Filsafat merupakan dasar perilaku seseorang dan juga merupakan dasar perilaku suatu Bangsa. Kalau Bangsa Indonesia melakukan suatu pendidikan, maka hal itu juga didasarkan kepada suatu filsafat, yaitu filsafat pendidikan. Selanjutnya, supaya pelaksanaan pendidikan terarah dan sistematis, maka perlu dibuatkan teorinya terlebih dahulu. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan selalu akan berpijak pada teori itu.

Filsafat pendidikan islam antara lain akan mengungkap persoalan-persoalan sebagai berikut :

1. Hakikat Tuhan;
2. Hakikat manusia;
3. Tujuan pendidikan;
4. Apakah tujuan pendidikan itu bersifat tetap atau berubah;
5. Mengapa tujuan itu harus begitu;
6. Apa latar belakang atau asumsinya;
7. Bagaimana tujuan mencapai itu;
8. Sampai kapan proses pendidikan itu harus berlangsung;
9. Apa instrumennya;
10. Siapa saja yang dilibatkan dan mengapa;
11. Seberapa jauh pelibatan masing-masing personal tersebut;

Jadi, filsafat pendidikan itu merupakan pedoman dan arah berpikir dalam mencapai hasil pendidikan yang dicita-citakan. Tanpa ada rumusan filsafat pendidikan yang jelas, maka pendidikan akan berjalan tanpa arah, haluan, dan pegangan.

Sementara itu teori pendidikan akan memberi arahan, antara lain dalam hal :

1. Macam-macam kewajiban manusia kepada tuhan-nya dan bagaimana tata cara beribadah manusia untuk bisa dekat kepada-Nya (Aspek transcendental)
2. Tugas dan tujuan hidup manusia di dunia
3. Menentukan macam-macam tujuan pendidikan
4. Konsep-konsep tentang pembawaan dan pengaruh lingkungan dalam pendidikan
5. Kurikulum yang dijadikan standart
6. Cara mengembangkan kurikulum sesuai dengan konsep yang diputuskan
7. Metodologi mendidik dan mengajarkan untuk merealisasikan konsep itu
8. Berbagai penunjang proses belajar mengajar

9. Lingkungan dan iklim pendidikan yang cocok
10. Model-model evaluasi
11. Perbedaan konsep antara jalur sekolah dengan jalur non sekolah

Berpijak dari filsafat dan teori pendidikan yang telah dirumuskan itu, sampai pada saat ini, masih dihadapkan pada kesulitan untuk mengintegrasikan dua kutub paradigma keilmuan dualistik. Dengan demikian tanpa mengesampingkan sasaran-sasaran yang bersifat teknis dan jangka pendek, filsafat dan teori pendidikan akan menghantarkan pada cakupan yang lebih komplisit dan menyeluruh.

KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

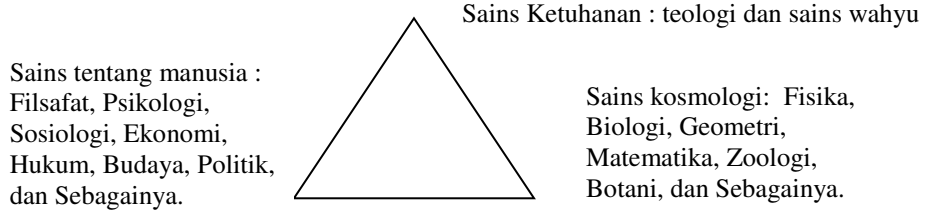
Kurikulum pendidikan Islam sampai pada saat ini, masih dihadapkan pada kesulitan untuk mengintegrasikan dua kutub paradigma keilmuan dualistik. Pada satu sisi, harus berhadapan dengan subjek-subjek sekuler, dan pada sisi yang lain dengan subjek-subjek keagamaan. Subjek-subjek sekuler biasanya terdiri dari jenis keilmuan umum seperti Matematika, Fisika, Biologi, Zoologi dan sebagainya. Sementara subjek-subjek keagamaan terdiri dari sejenis Sains, wahyu seperti Al-Qur'an, al-Hadits, Fiqih, Teologi, Tasawuf, Tauhid, dan sebagainya.

Dari dikotomi di atas, kurikulum pendidikan Islam masih banyak didominasi oleh sains jenis kedua sementara pengakajian terhadap jenis sains-sains alam masih kurang. Padahal menurut terminologi pendapat Islam (Nasr, 1968) Tuhan menurunkan Al-Qur'an –Nya dalam dua bentuk : Al-Qur'an yang tertulis (*recorden Al-Qur'an*), yaitu wahyu yang tertulis dalam lembaran buku yang dibaca oleh umat Islam setiap hari, dan Al-Qur'an yang terhampar (*created qur'an*), yaitu alam semesta, cagar raya, atau kosmologi ini.

Mengaji dan meneliti kedua jenis sains tersebut sama pentingnya. Memang harus ada prioritas mana yang harus didahulukan, karena mempelajari keduanya secara bersamaan akan dirasakan berat. Menurut para ahli pendidikan Islam, sebelum mendalami sains-sains sekuler, anak didik harus dibekali sikap religiusitas yang kuat sejak mulai pendidikan seperti sholat, membaca qur'an, tafsir, hadits, bahasa Arab, puasa, dan ilmu ketauhidan. Dengan demikian, ketika mereka mengambil spesialis sains-sains sekuler sudah memiliki landasan agama yang kokoh sehingga diharapkan mampu menambah bidang subjek-subjek sekuler pada tingkat tinggi. Dengan dasar agama yang kokoh dan penguasaan sains-sains alam yang mendalam, maka anak didik akan dapat menjelaskan term-term ajaran Islam dalam bahasa dan logika sains modern.

Kategori sains-sains diatas, apabila dibuat skema kira-kira sebagai berikut (Skema 1)

Skema 1 : Segitiga Sains

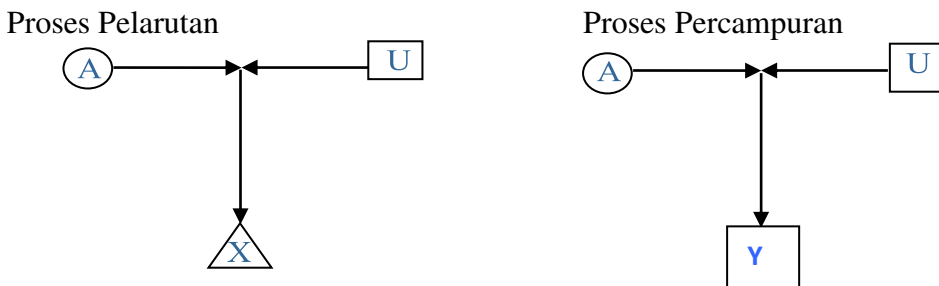


Ketiga kutub tersebut merupakan satu kesatuan dan daripadanya diharapkan dapat memperoleh pengertian penghayatan dan pengamalan ke arah terbentuknya intelektualisme muslim. Yakni, pribadi yang utuh yang pemikirannya bisa menyatukan ketiga kutub ilmu tersebut.

Lembaga pendidikan Islam baik yang masih tradisional maupun yang sudah modern perlu mengintegrasikan antara subjek-subjek keagamaan dengan subjek-subjek sekuler dalam satu paket pembelajaran. Dengan terintegrasinya ketiga paradigma ilmu tersebut maka untuk terciptanya kualitas anak didik yang mempunyai kemampuan 3H yaitu : *Head* (aspek kognitif dan kecerdasan otak), *Heart* (aspek afektif dan kecerdasan emosi dan spiritual), dan *Hand* (aspek psikomotorik dan kecakapan teknis), dapat diwujudkan

Berangkat dari pola pikir integratif yaitu menyatukan arti kehidupan dunia dan akhirat, maka pendidikan umum pada hakikatnya adalah pendidikan agama juga, begitu sebaliknya, umum idealnya, tidak perlu terjadi persoalan ambivalensi dan dikotomik dan orientasi pendidikan Islam A.M. Saefuddin (1991) mengajukan formal pendidikan kreatif untuk dapat mengintegrasikan secara padu. Perpaduan itu harus terjadi sebagai proses pelarutan, dan bukan sekedar proses percampuran biasa. Perbedaan antara proses pelarutan dan proses percampuran secara sederhana dapat dilihat sebagai berikut pada skema 2 :

Skema 2 : Integrasi Kurikulum



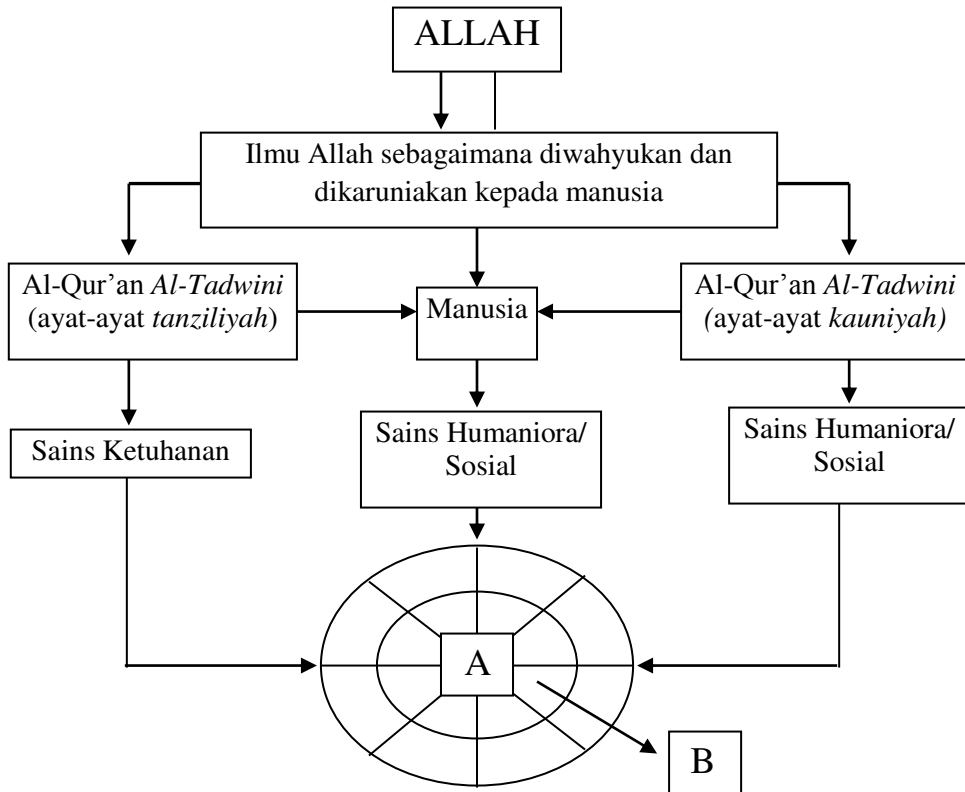
A : Menteri Pendidikan Agama	Y : Hasil percampuran antara A dan U secara substantif maupun formatif tidak ada perbedaan antara A dan semula dengan A dan U dalam Y
U : Menteri Pendidikan Umum	
X : Perbandingan A dan U, berbeda secara substantif maupun formatif dengan A maupun U	

Pemikiran ini mengandalkan penemuan suatu bentuk perpaduan materi-materi pendidikan agama dengan umum yang barangkali akan merupakan suatu konsep ilmu Islam. Disebut Ilmu Islam, karena nilai-nilai Al-Qur'an dapat diaktualisasikan tidak dalam perwujudan rancangan sistem pendidikan saja, tetapi dalam langkah-langkah operasionalisasi materinya mesti pula berpedoman pada kaidah-kaidah Qur'an, (Al Attas, 1979 : 126), sesuai dengan kesatuan tiga serangkai perangkat tindak, yakni motivasi – cara – tujuan

Dengan adanya penyatuan ilmu / sains dengan nilai-nilai ajaran Islam, persoalan dikotomi akan dapat dicarikan jalan keluarnya. Wawasan ilmu tidak lagi dipisahkan secara dikotomis dalam pembagian ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum tapi akan dibedakan (bukan dipisahkan) menjadi ilmu-ilmu yang menyangkut ayat-ayat *tanziliah* (ayat-ayat yang tersurat dalam Al-Qur'an / hadits dan ilmu tentang ayat-ayat *kauniyah* (ilmu / pengetahuan tentang kealaman).

Perhatikan skema 3 berikut :

Skema 3 : Integralisasi Ilmu dan Islam



A = Integrasi Sains Islam

B = Spesialisasi Ilmu

Kurikulum pendidikan Islam selanjutnya dapat disusun berdasarkan wawasan ilmu pengetahuan yang telah terintegrasi tersebut hal ini akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu terhadap struktur, tujuan, pendekatan, materi, dan institusi pendidikan yang dipersiapkan.

MENATA KEMBALI SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

Sistem pendidikan di Indonesia mewariskan dua tradisi yang telah berakar di dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri, yakni tradisi Islam dan Tradisi pendidikan modern yang dibawah oleh belanda (Maksum, 1997 : 113). Dua tradisi ini kemudian melahirkan dua model system dan penyelenggaraan pendidikan yang tetap bertahan hingga

dewasa ini. Tradisi Islam sistem pendidikan model pondok pesantren yang menekankan pada pengkajian dan pendalaman khazanah ilmu – ilmu keislaman dan sekaligus sebagai pusat gerakan bahwa penyebaran Islam kepada masyarakat. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, para pembaru Islam memperkenalkan model pendidikan madrasah yang merupakan jalan tengah antara model pendidikan Islam tradisional (pesantren) dan model pendidikan modern (sekolah). Madrasah selain tetap memberikan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, juga mulai memperkenalkan ilmu-ilmu sekuler (umum), terutama ilmu alam dan matematika, meskipun dalam porsi yang relatif kecil.

Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda mewarisi tradisi pendidikan modern yang menekankan pada aspek pendidikan sains dan keterampilan. Pada awalnya, sekolah-sekolah yang didirikan Belanda di nusantara lebih dimaksudkan sebagai tempat pelatihan calon-calon pegawai rendahan birokrasi lokal Belanda. Tetapi kalangan yang bisa mengikuti pendidikan Belanda sangat terbatas pada kelompok elite priyayi. Keluarga ningrat dan kaya, di perkotaan. Sementara kalangan muslim pedesaan hampir tidak memperoleh kesempatan pendidikan sama sekali.

Setelah kemerdekaan, dualisme tersebut justru diperkuat dengan lahirnya undang-undang No 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang menjadi acuan bagi kebijakan pendidikan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur keberadaan madrasah UU tersebut menegaskan melegitimasi adanya dualisme dalam menyelenggarakan pendidikan. Sekolah sekuler (umum) berada di bawah pengelolaan dan pembinaan kementerian pendidikan, sedangkan madrasah dikelola dan dikembangkan oleh kementerian agama (Mulyanto, 1977).

Dualisme pendidikan ini selanjutnya ditegaskan di dalam Tap MPRS No. 2/MPRS/1960 3 Desember 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Perencanaan, tahap pertama tahun 1961 sampai 1968 dalam kaitannya dengan pendidikan, ketentuan ini antara lain menyebutkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah rakyat/sekolah dasar sampai universitas-universitas atau perguruan tinggi, dengan pengertian murid-murid tidak ikut serta apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya (Tadjab, 1987) Dalam Tap MPRS tersebut juga dijelaskan bahwa madrasah hendaknya berdiri sendiri sebagai badan otonom di bawah pengawasan departemen agama dan bukan di bawah pengawasan

departemen pendidikan dan kebudayaan. Dengan Tap MPRS ini, madrasah tetap berada diluar sistem pendidikan nasional.

Perbedaan naungan institusional di pemerintahan tersebut selanjutnya melahirkan perbedaan dan dualisme baik menyangkut struktur kurikulum, menyediakan tenaga pendidikan, dan pembiayaan struktur kurikulum madrasah hingga awal 1970-an hampir 90 % bernuansa Islam. Sedangkan sekolah umum mengembangkan kurikulum yang 100 % bermuatan akademik dan pelajaran keagamaan hanya berupa kurikulum pilihan.

Upaya pemerintah mengakhiri dikotomi ini sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 1972. Kepres No 34 / 1972, yang kemudian dipertegas dengan inpres No. 15 / 1974 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Inti dari kebijakan itu adalah hanya kementerian pendidikan dan kebudayaanlah yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan. Otomatis hal ini berarti lembaga pendidikan dan kejuruan yang berada di bawah departemen agama dan departemen lainnya harus diserahkan kepada departemen pendidikan dan kebudayaan.

Namun demikian, ketegangan politik antara pemerintah orde baru dengan umat Islam pada awal tahun 1970-an mendorong kalangan Islam untuk menolak gagasan dasar Kepres tersebut. Tetapi penolakan tersebut melahirkan kompromi besar yang menentukan masa depan madrasah, yakni lahirnya surat keputusan bersama (SKB) tiga materi, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, dan menteri dalam negeri pada tanggal 24 Maret 1975 No. 0371 U/1975 No 6 tahun 1975, dan No 16 tahun 1975. SKB tersebut memberikan dasar bagi ketetapan madrasah di bawah departemen agama dan transformasi internal dalam kurikulum pendidikan madrasah dengan memasukkan 30 mata pelajaran akademik (non agama). (Muhaimin, 2003 : 176).

Selanjutnya, lahirlah SKB 2 materi tahun 1984 yang salah satu isinya adalah revisi struktur kurikulum nasional dan kurikulum madrasah, yang kemudian dikenal kurikulum 1984. Inti dari perubahan kurikulum ini adalah kompetensi dasar (*basic kompetensi*) di sekolah umum dan madrasah diupayakan harus sama agar memberikan kesempatan pada siswa lulusannya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional semakin menemukan bentuk dalam UUSPN No. 2 tahun 1989. Melalui UUSPN ini, madrasah mengalami perubahan definisi, dari sekolah agama menjadi sekolah umum bercirikan Islam. Perubahan definisi ini penting artinya karena dengan demikian berarti berdasarkan tidak hanya telah

menjadi lembaga modern, tetapi ia juga mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Perubahan definisi itu selanjutnya juga menuntut adanya perubahan kurikulum, maka lahirnya kurikulum 1994. Karena madrasah tidak lagi sekolah agama, maka kurikulumnya 100 % sama dengan sekolah umum departemen pendidikan. Semua upaya pengintegrasian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional tersebut menemukan titik puncaknya pada awal tahun 2000 setelah presiden RI ke empat, KH. Abdurrahman Wahid merubah struktur kementerian pendidikan dari “Departemen Pendidikan dan Kebudayaan” menjadi “Departemen Pendidikan Nasional”. Perubahan ini memperluas horizon departemen hingga memayungi semua bentuk, jenis, dan keragaman lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal itu, presiden KH. Abdurrahman Wahid menggulirkan ide “Pendidikan satu atap” sistem pendidikan nasional dan memiliki status dan hak yang sama. Inilah yang diharapkan akan mengakhiri dikotomi “pendidikan umum” dan “pendidikan Islam”

Dengan terintegrasinya sistem pendidikan menjadi satu atap, apakah persoalan lama seperti dikotomi, ambivalensi, dan disintegratif berarti sudah selesai dan tuntas? Jawabannya, ternyata belum. Sampai saat ini, masih terjadi dikotomi : *Pertama*, dikotomi institusi, dan *kedua*, dikotomi keilmuan.

Pertama, dikotomi institusi. Departemen agama masih mengurus pendidikan (madrasah) sebagaimana masa-masa lalu. Oleh karena itu, perlu adanya restrukturisasi institusi, dimana seluruh madrasah yang masih dikelola oleh departemen agama mulai dari tingkat pusat sampai di daerah diserahkan kepada departemen pendidikan. Tentu ini tidak mudah karena itu, dua departemen tersebut perlu untuk merumuskan bentuk dan model “pendidikan satu atap”. Sejauh ini, implementasi “pendidikan satu atap” masih sulit diwujudkan. Perlu adanya jiwa besar dari pejabat di departemen agama untuk menyerahkan aset-aset pendidikannya kepada departemen pendidikan nasional, begitu juga harus ada kelulusan dan komitmen dari departemen pendidikan nasional untuk memperlakukan madrasah secara adil dan sejajar dengan sekolah umum yang lebih dulu jadi tanggung jawabnya. Apabila sikap ini terwujud, maka tidak ada lagi kebijakan diskriminasi terhadap madrasah dan pendidikan Islam lainnya seperti terjadi selama ini.

Kedua, dikotomi keilmuan. Problem dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum telah muncul sejak lama dan sampai sekarang masih berlangsung. Secara simbolik, dikotomi jenis keilmuan

ini masih terlihat dengan jelas antara madrasah dan sekolah umum. Pembagian kurikulum di madrasah masih bermuara pada ilmu umum dan ilmu agama, begitu juga di sekolah umum masih ada mata pelajaran umum dan juga agama. Di madrasah mata pelajaran agama Islam dibagi ke dalam beberapa sub mata pelajaran, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah, Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab, yang masing-masing berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Sedangkan di sekolah umum mata pelajaran agama Islam di atas digabung menjadi satu dan porsi hanya dua jam pelajaran per minggu. Untuk menghapus dikotomi tersebut, perlu adanya reformulasi (perumusan kembali) kurikulum yang benar-benar integratif. Ajaran-ajaran Islam tidak lagi diberikan dalam bentuk mata pelajaran secara formal seperti Al-Qur'an, Hadits, Tafsir, Fiqih, Sejarah Islam, dan Tasawuf, melainkan diintegrasikan sepenuhnya dalam mata pelajaran umum. Ini memang sulit dan membutuhkan pemikiran yang serius, namun apabila dapat dilakukan maka dikotomi akan bisa dihilangkan. Sehingga dikenal lagi sebagai pembedaan mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, baik di madrasah maupun di sekolah umum konsekuensinya diperlakukan guru-guru yang mampu mengintegrasikan wawasan imtaq dan iptek, diperlukan buku-buku teks yang bernuansa agamis dan bermuatan pesan-pesan religius pada setiap bidang atau mata pelajaran. Untuk upaya ke arah itu, sebenarnya departemen agama telah memulai langkah besar dalam menyusun buku panduan guru mata pelajaran umum yang bernuansa islami, akan tetapi belum bisa menghapus sepenuhnya dikotomi tersebut.

PERAN PENDIDIKAN ISLAM

Dari kajian dan pemaparan di atas, bagaimana pendidikan Islam dapat berperan dalam kancah kompetisi global tersebut? Agar umat Islam dapat berkiprah dalam masyarakat global, maka pendidikan Islam diharapkan tampil dengan nuansa sebagai berikut :

Pertama, menampilkan Islam yang lebih ramah dan sejuk, sekaligus menjadi pelipur lara bagi kegerahan hidup manusia modern. Tawaran ini mengharuskan umat Islam menghayati nilai-nilai universal yang diajarkan Islam dan teologi inklusif yang diperankan oleh nabi Muhammad SAW. Di samping itu, tawaran ini akan menghapus kehampaan spiritual dan kekosongan batin manusia modern sebagai gaya hidup Fir'aunis akibat hiruk pikuk kehidupan global yang hedonistik dan materialistic.

Kedua, Islam yang toleran terhadap manusia secara keseluruhan agama apapun dianutnya. Sebab Islam adalah agama *rahmat lil alaamin*, mendatangkan kebaikan dan kedamaian untuk semua. Dengan sikap ini, Islam mengakui tentang pluralisme, baik dalam keragaman pendapat pemahaman, ideologi, etnis maupun agama.

Ketiga, menampilkan visi Islam yang dinamis, kreatif, dan inovatif, sehingga bisa membebaskan umat Islam dari belenggu – belenggu dan penjahat taklid, status quo, menyukai kemapanan, dan alergi terhadap pembaharuan, harus ditinggalkan. Karena sikap-sikap tersebut menyebabkan kreatifitas dan dinamisnya sebagai manusia menjadi hilang.

Keempat, menampilkan Islam yang mampu mengembangkan etos kerja, etos politik, etos ekonomi, etos ilmu pengetahuan, dan etos pembangunan. Karena sepanjang sejarah, kelima etos itulah yang dapat mendatangkan kejayaan umat Islam.

Kelima, menampilkan revifalitas Islam, dalam bentuk intensifikasi keislaman lebih berorientasike dalam (*inward oriented*), yakni membangun kesalahan intrinsik dan esoterik, daripada instensifikasi ke luar (*out word oriented*) yang bersifat ekstrinsik dan eksoteris. Yakni kesalahan formalitas. Orientasi pemahaman intrinsik dan eksetoris ini mejadi penting, karena akhir-akhir ini banyak bermunculan pemahaman yang lebih mementingkan simbul dan bentuk luar, daripada eksistensi pelajaran Islam itu sendiri. Pemahaman seperti ini akan mencegah lahirnya fundamentalisme dan radikalkisme agama yang justru menimbulkan citra negatif bagi Islam dan umat Islam.

PENUTUP

Dari serangkaian analisis di atas, dapat ditarik simpulan bahwa konstruk pemikiran pendidikan Islam berwawasan masa depan perlu diarahkan pada peningkatan daya jawabnya terhadap problem kehidupan kontemporer, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Qur'an dan Sunnah. Kepekaan menangkap perkembangan terkini menjadi pendidikan Islam responsip terhadap kemajuan, sementara dengan tetap berpegang teguh pada kedua sumber otentik Islam tersebut, maka pendidikan Islam akan mempunyai ruh dan kekuatan moral menghadapi setiap perubahan yang ditimbulkan oleh arus globalisasi. Nilai-nilai dan kandungan moral Al-Qur'an dan Al-Sunnah harus dapat ditransformasikan kepada anak didik dalam menghadapi kehidupan modern masyarakatnya. Setiap persoalan kemodernan harus dipecahkan dengan bingkai dan spirit Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Inilah peran

strategis pendidikan Islam. Strategisnya tidak saja terletak pada kemampuannya dalam merespon perubahan global, tetapi yang lebih penting adalah kemampuannya membingkai setiap perubahan dalam sinaran Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan sekaligus mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan anak didik. Dengan demikian, output pendidikan Islam nantinya akan peka terhadap perubahan (kalau bisa justru memeloporinya) dengan tetap berpegang teguh nilai-nilai ajaran agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Akbar S. 1994. *Islam in the Age of Postmodernity, an Article in Islam, Globalization, and Posmodernity*. London: Routhledge.
- AM. Saefuddin. 1991. *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*. Bandung: Mizan.
- Budiman, Arief. 1994. *Setelah Pasca Modernisme Apa? Dalam Ulumul Qur'an*. No. 1, vol V.
- Harahap, Syahrin. 1997. *Islam Dinamis; Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____, 1998. *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana dan IAIN SU.
- Maksum. 1997. *Madrasah; Sejarah Pengembangannya*. Jakarta: Logos.
- Muhaimin. 2003. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: PSAPM Surabaya dan Pustaka Pelajar.
- Naisabitt, John and Patricia Aburdene. 1990. *Megatrends 2000*. London: Sidwick.
- _____, 1996. *Megatrends Asia; Eight Megatrends that are reshaping Our World*. New York; Simon dan Schuster.
- Nasr, Sayyed Hossein. 1968. *Man and Nature The Spiritual Crisis of Modern Man*. London: Unwin Paperbacks.
- S.N. Al-Attas. 1979. *Aims and Obyektives of Islamic Education*. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Sumardi, Mulyanto. 1977. *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975*. Jakarta: LPIAK Balitbang Depag.

Tadjab. 1987. *Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, Tesis*. Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kali Jaga.

Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya. Semarang: Aneka Ilmu, 1992.